STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM UPAYA MENCAPAI KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN BALANGAN

Risalatun Nahdia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: risalatunnahdia@gmail.com

Abstract: *An inadequate exploration of Local Own Income potential sources poses one of the reasons of the lacking fiscal independence of Balangan Regency. As such, performance evaluation and preparation strategies are indispensable to improving the Local Own Income. This study employs descriptive qualitative, in which the data are collected by interviews, observation, and documentation, and applies the ratio analysis on the effectiveness and the efficiency of Local Own Income, and Miles & Hubberman interactive model data analysis. The results of the study reveal that the Local Own Income of Balangan Regency between 2016 and 2020 has been effective and efficient with intensification and extensification of local taxes/levies as the major strategy to achieve fiscal independence.*

Keywords: *Strategy, Local Own Income, Fiscal Independence*

Abstrak: Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya indeks kemandirian fiskal Kabupaten Balangan, oleh karena itu diperlukan evaluasi kinerja dan penyusunan strategi-strategi untuk meningkatkan PAD. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data menggunakan analisis rasio efektivitas PAD dan efisiensi PAD serta analisis data model interaktif Miles & Hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 adalah efektif dan efisien, serta strategi utama peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah.

Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal

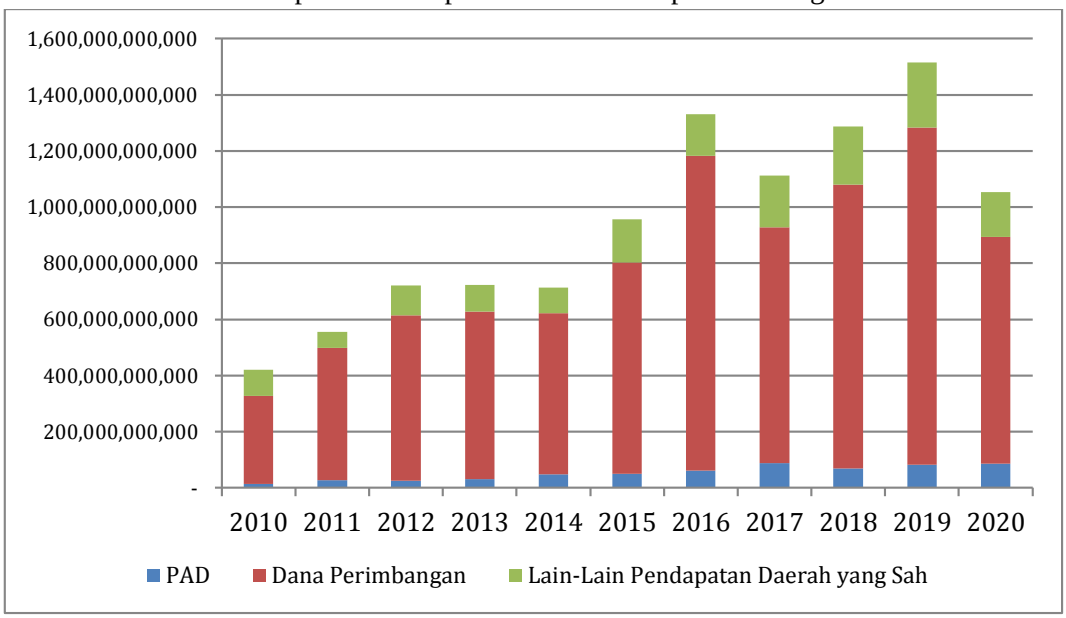
PENDAHULUAN

Buah dari era reformasi yang dapat dipetik oleh Pemerintah Daerah adalah diberikannya hak daerah untuk mengatur daerahnya secara otonom melalui Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut lahir sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih demokratis dan menjadi awal dimulainya perluasan desentralisasi. Desentralisasi memiliki implikasi pelimpahan beberapa tanggung jawab dan hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di dorong untuk mampu berkreasi mengembangkan daerahnya agar

terbuka peluang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga memiliki kemandirian fiskal yang mencukupi guna melakukan upaya pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan kesejahteraan rakyat di daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaannya melakukan review atas kemandirian fiskal pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. Pada tahun 2019 sebanyak 458 dari 508 kabupaten/kota di Indonesia termasuk dalam kategori belum mandiri. Ini berarti keuangan 458 kabupaten/kota tersebut masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2018 IKF Kabupaten Balangan berada di angka 0.0533 dan di tahun 2019 sebesar 0.0545. Angka ini menunjukkan kemandirian fiskal Kabupaten Balangan masih dalam kategori belum mandiri. Hanya sebesar 5.45% dari belanja daerah yang dapat dibiayai oleh PAD. Kontribusi PAD terhadap pembiayaan pemerintah daerah di tahun 2010 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010-2020



Sumber: DJPK Kementrian Keuangan Indonesia, 2020

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Tahun 2020 mengenai Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010-2017 menggunakan metode analisis *Share* dan *Growth*, Kabupaten Balangan memiliki nilai *growth* paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan, dengan nilai sebesar 30.69%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya adalah tinggi, serta menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Kabupaten Balangan memiliki potensi daerah yang sangat baik ke depannya dalam pertumbuhan ekonomi sektoral, oleh karena itu menjadi hal yang mungkin

bagi Kabupaten Balangan untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber PAD guna meningkatkan tingkat kemandiriannya. Kabupaten ini kaya dengan sumber daya alam yang seharusnya dapat memberikan sumbangsih tinggi terhadap peningkatan PAD. Sebut saja tambang batu bara, pertanian dan perkebunan, namun belum dikelola dan diperhitungkan secara tepat sehingga masih banyak potensi sumber pendapatan yang dapat digali lagi.

Kabupaten Balangan miliki pertumbuhan ekonomi yang baik namun belum bisa mencapai kemandirian fiskal karena belum optimal dalam penyerapan sumber-sumber PAD. Penggalian potensi PAD secara optimal memerlukan perhitungan potensi pendapatan daerah secara tepat, yang akan mempengaruhi pemetaan dan penetapan target PAD. Kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ini harus dievalusi secara berkala agar dapat disusun strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian fiskal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, serta menganalisis strategi peningkatkan PAD dalam upaya mencapai kemandirian fiskal di Kabupaten Balangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, Kepala Bidang Pendataan & Penetapan, dan Kepala Sub-bidang Pendataan. Informasi yang dikumpulkan mengenai kebijakan dan rancangan strategi program peningkatan PAD, serta data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data sekunder di penelitian ini adalah data terkait dengan sumber-sumber pendapatan daerah dan kondisi umum daerah Kabupaten Balangan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Balangan. Untuk itu, dilakukan analisis data dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu analisis efektifitas dan analisis efisiensi. Analisis ini menggunakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD yang dikemukakan oleh Mahmudi.

1. Rasio efektivitas PAD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \; X \; 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Efektifitas	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

2. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \; X \; 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi PAD dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efisiensi PAD

Efektifitas	Kriteria
< 10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
> 40%	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi, 2019

Kedua, menggunakan analisis model Interaktif Miles & Hubberman untuk mengetahui faktor internal dan eksternal lingkungan organisasi yang disajikan menggunakan Tabel/Matriks SWOT untuk menganalisis strategi peningkatan PAD dalam upaya kemandirian fiskal. Model interaktif ini dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam merealisasikan PAD. Besarnya rasio efektivitas ditentukan dari upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan serta besaran target yang ditetapkan tersebut. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai sebesar 100 persen. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD maka menunjukkan upaya pemungutan PAD yang dilakukan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 3. Efektivitas PAD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Efektivitas PAD 2016-2020				
Tahun	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Efektivitas**	**Penilaian**
2016	42.607.500.000	61.498.585.082	144%	Sangat efektif
2017	67.774.927.829	87.849.236.123	130%	Sangat efektif
2018	64.473.287.853	68.649.415.233	106%	Sangat efektif
2019	60.407.875.139	82.522.528.225	137%	Sangat efektif
2020	66.465.200.245	86.176.610.154	130%	Sangat efektif

Sumber : BKD Kabupaten Balangan 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio efektivitas PAD Kabupaten Balangan pada tahun 2016-2020 mencapai rasio di atas 100 persen dengan rata-rata 129,4 persen sehingga kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengumpulkan PAD selama lima tahun terakhir dapat dikatakan sangat efektif karena telah berhasil menjalankan tugasnya dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditentukan.

Efisiensi PAD

Rasio efisiensi perlu diperhatikan pemerintah untuk mengetahui apakah kinerja dalam memperoleh PAD telah efisien atau tidak, sebab meskipun rasio efektivitasnya sudah baik tetapi jika biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh PAD dapat dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai di antara 10 persen dan 20 persen. Semakin kecil persentase rasio efisiensi maka

semakin baik kinerja pemerintah dalam mengumpulkan PAD.

Biaya permerolehan PAD ini merupakan akumulasi dari realisasi anggaran program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah. Di antara kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam program ini ialah peningkatan pelaksanaan dan pemantauan pembangunan, pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 4. Efisiensi PAD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020

Efisiensi PAD				
Tahun	**Biaya Pemerolehan PAD (Rp)**	**Realisasi PAD (Rp)**	**Efisiensi**	**Penilaian**
2016	3.547.511.118	61.498.585.082	5,8%	Sangat efisien
2017	5.469.464.687	87.849.236.123	6,2%	Sangat efisien
2018	4.199.546.984	68.649.415.233	6,1%	Sangat efisien
2019	1.895.696.854	82.522.528.225	2,3%	Sangat efisien
2020	1.466.319.199	86.176.610.154	1,7%	Sangat efisien

Sumber : BKD Kabupaten Balangan 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio efisiensi PAD di Kabupaten Balangan pada tahun 2016-2020 mencapai rasio di bawah 10 persen dengan rata-rata 4,4 persen sehingga kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengumpulkan PAD selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sangat efisien karena telah mampu menekan biaya-biaya dan merealisasikan target dengan baik.

Rasio efisiensi pada tahun 2016 sebesar 5,8 persen. Pada tahun 2017 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi 6,2 persen, hal ini dipengaruhi oleh besaran biaya pemerolehan PAD yang mengalami kenaikan. Tahun 2018 rasio efisiensi tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 6,1 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 2,3 persen dan 1,7 persen.

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah semakin mengalami perbaikan. Efisiensi kinerja sangat terlihat di tahun 2019 dan 2020. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD semakin sedikit dan realiasi PAD yang diperoleh semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menekan biaya dan merealisasikan PAD selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan

Strategi Peningkatkan PAD

Tabel 5. Matriks SWOT Strategi Peningkatan PAD di Kabupaten Balangan

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (S) 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD 2. Tupoksi yang jelas bagi aparatur pengelola PAD 3. Kerjasama dengan pihak ketiga	Kelemahan (W) 1. Sumber Daya Aparatur yang kurang memadai 2. Penerapan sanksi pelanggaran hukum perpajakan 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Organisasi pengelola keuangan dan pendapatan daerah masih menjadi satu kesatuan
Peluang (O) 1. Terdapat potensi yang belum digali 2. Penggunaan sistem informasi dan teknologi	S-O 1. Pengoptimalan potensi PAD dengan Pembaharuan *database* dan penilaian kembali objek pajak/retribusi (S1, S2, S3, O1) 2. Penataan sistem administrasi (S1, S2, S3, O2)	W-O 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PAD (O2, W3) 2. Peningkatan SDM serta kinerja aparatur (02, W1, W4)
Ancaman (T) 1. Rendahnya kesadaran masyarakat 2. Koordinasi dengan instansi terkait 3. Mutasi & promosi jabatan aparatur	S-T 1. Sosialisasi secara berkala (S1, S2, T1) 2. Peningkatan pelayanan urusan perpajakan (S1, T1) 3. Kerjasama dengan bentuk regulasi yang saling menguntungkan (S3, T1) 4. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait (S1, T1, T2)	W-T 1. Mengoptimalkan penerapan sanksi (W2, T1)

Secara umum, strategi yang dijalankan pemerintah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi berupa perbaikan sistem pelayanan pajak, pembaharuan data objek pajak, dan peninjauan tarif pajak. Ekstensifikasi berupa *mapping* pajak/retribusi yang belum pernah digarap dan pendataan wajib pajak baru. Kinerja pemerintah dalam menjalankan program-programnya untuk meningkatkan PAD harus dievaluasi untuk mengukur sejauh mana target yang ditetapkan tercapai. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja

pemerintah dalam penggalian potensi PAD diantaranya adalah efektivitas dan efisiensi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD adalah efektif dan efisien. Penetapan strategi yang tepat serta didukung dengan kinerja yang baik tentu diharapkan dapat mewujudkan tujuan tercapainya kemandirian fiskal, namun dalam pelaksanaannya strategi serta kinerja yang efektif dan efisiensi tidak selalu diiringi dengan pertumbuhan IKF yang menjadi indikator tercapainya kemandirian fiskal. Terdapat faktor-faktor lain yang menghambat kemandirian fiskal di kabupaten Balangan. Berdasarkan analisis peneliti, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Kurangnyapembangunan infrastruktur daerah
2. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
3. Terdapat batasan pajak yang dapat dikuasai pemerintah daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan saran-saran yang dapat menjadi alternatif kebijakan pemerintah Kabupaten Balangan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal, yakni:

1. Membangun infrastruktur yang mengundang obyek pajak / retribusi
2. Peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD
3. Meningkatkan dan mendorong investasi
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD
5. Melakukan perhitungan akurat terhadap potensi dan hasil produksi sektor pertambangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas PAD Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 rata-rata 129,4 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja pengelolaan PAD sangat efektif, yakni dapat mengumpulkan PAD sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Efisiensi PAD Kabupaten Balangan tahun 2016-2020 rata-rata 4,4 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja pengelolaan PAD sangat efisien, yakni dapat menekan biaya-biaya dalam memperoleh PAD dengan baik.
3. Strategi utama yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Balangan berdasarkan analisis SWOT adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dengan cara *update* data pajak/retribusi dan *mapping* potensi pajak/retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[BKD]. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. 2021. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020. Balangan. Badan Keuangan Daerah.

Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, *10*(1), 15–24.

Haryanto, J. T. (2020). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *5*(3), 217–234.

Huda, S., & Fitriyah, Z. (2017). Model Pemetaan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Jawa Timur. *Neo - Bis*, *11*(2), 154–174.

Indonesia, B. P. K. R. (2020). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Halim, Abdul (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551396, 555000, Fax. (0341) 553834
E-mail : feb@ub.ac.id http://www.feb.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan Judul :

STRATEGI PEMINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM UPAYA MENCAPAI KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN BALANGAN

Yang disusun oleh :

Nama	:	RISALATUM NAHDIA
NIM	:	175020300111022
Jurusan	:	S 1 Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal .....

Malang, Mei 2021

Dosen Pembimbing,

Lilik Purwanti, Dr., AK., CA.